
Penerapan E-Government Guna Mendukung Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Tapak Kabupaten Magetan

Titis Ayu Angganten

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang
(Jl. Tlogomas, no.246, Malang, Indonesia)

* Corresponding author: titisangganten19@gmail.com

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan diwujudkan dengan sebuah sistem yang disebut dengan e-government atau electronic government. E-government merupakan suatu sistem dimana pemerintah menggunakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet dalam memberikan pelayanan dan juga informasi kepada publik. Di Kecamatan Panekan Kab. Magetan telah menerapkan sistem E-government, salah satunya adalah Desa Tapak yang mewujudkan (E-government) dengan menyediakan situs website resmi untuk dapat diakses oleh masyarakat melalui website tapak.magetan.go.id yang diharapkan dapat diakses untuk meningkatkan kualitas layanan dan membuat informasi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Diluncurkannya website resmi tersebut bertujuan untuk membuka ketersediaan akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus menjembatani komunikasi antara Pemerintah Desa Tapak dengan masyarakat guna membangun ruang atau media aspirasi warga. Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Penerapan E-Government Guna Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Web Di Desa Tapak dan mengetahui faktor penghambat pemerintah desa dalam menerapkan E-government guna mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik berbasis web Di Desa Tapak Kabupaten Magetan. Metode penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai penerapan e-government di Desa Tapak, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan dengan menganalisis tiga indikator yaitu Support, Capacity, Value. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat pemerintah desa, observasi langsung terhadap penggunaan situs web, dan studi dokumen yang relevan. Hasil penelitian yaitu Support (Dukungan): Sosialisasi awal telah dilakukan, tetapi banyak masyarakat masih kesulitan mengakses website karena rendahnya literasi digital. Capacity (Kapasitas): 1. Anggaran : Belum ada alokasi khusus untuk pengembangan website 2. Infrastruktur: Fasilitas seperti komputer masih minim dan using 3. SDM: Usia perangkat desa yang sudah tua dan keterbatasan keahlian teknologi menjadi kendala, meski ada harapan dengan perangkat baru. Value (Manfaat): Website memudahkan akses informasi dan layanan tanpa harus ke kantor desa, menghemat waktu dan biaya. Namun, kendala seperti jaringan internet dan data yang belum lengkap masih perlu diperbaiki.

Kata Kunci: E-Government, keterbukaan informasi publik, transparans

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat berkembang di hampir seluruh negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Penerapan sistem e-government di Indonesia diatur didalam Inpres RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Egovernment. Didalam Inpres tersebut diatur bahwa setiap lembaga pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah wajib untuk membuat, mengembangkan serta menerapkan konsep e-government pada masing-masing lembaga, terutama berkaitan dengan penyediaan informasi kepada public (Yuono, 2023). E-government juga merupakan sebuah sistem yang akan

Silakan kutip artikel ini sebagai: Angganten, T. A. (2024). Penerapan E-Government Guna Mendukung Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Tapak Kabupaten Magetan. Jurnal Sosial Humaniora (JSH), 2(1), 1-10. <https://doi.org/10.70214/vyb31023>

mengintegrasikan instansi instansi pemerintah yang ada serta mempermudah jalur bagi masyarakat luas dalam mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan. Dengan adanya E-Government sangat diharapkan dapat lebih meningkatkan organisasi dan manajemen pemerintahan dan juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi (Prisanda & Febrina, 2019). Kebebasan dalam mengakses informasi publik telah di atur dalam UndangUndang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Berdasarkan UU tersebut, seluruh badan publik diwajibkan secara terbuka menyediakan informasi public. Selain itu bagian ketiga UU Desa No. 3 tahun 2024 Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan jelas disebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses Informasi Melalui Sistem Informasi yang di kembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Tujuan dari menciptakan sistem informasi desa adalah untuk memudahkan pekerjaan kantor desa dengan menggunakan situs web untuk ketersediaan layanan dan informasi desa (Andra B. A. Firhansyah, Supriyatna A., & Jannah B. R., 2023).

Dengan menggunakan Sistem Informasi Desa untuk membuat e-government lebih baik, pemerintah desa harus dapat secara konsisten mempertahankan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi, serta pemerintahan berbasis teknologi informasi (Laksana et al., 2014). Kemudian dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Magetan juga menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 1 ayat (9) bahwa: "Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE." Dengan demikian pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Adillah et al., 2024).

Di Kecamatan Panekan Kab. Magetan telah menerapkan sistem Egovernment, salah satunya adalah Desa Tapak yang mewujudkan (E-government) dengan menyediakan situs website resmi untuk dapat diakses oleh masyarakat melalui website *tapak.magetan.go.id* yang diharapkan dapat diakses untuk meningkatkan kualitas layanan dan membuat informasi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Diluncurkannya website resmi tersebut bertujuan untuk membuka ketersediaan akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus menjembatani komunikasi antara Pemerintah Desa Tapak dengan masyarakat guna membangun ruang atau media aspirasi warga. Apabila penerapan e-government tersebut berjalan dengan lancar dan baik, maka akan sangat menunjang transparansi dan keterbukaan informasi oleh pemerintah kepada masyarakat (Setyawan, 2022). Transparansi dan keterbukaan informasi publik didasari oleh kebebasan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan dan pemerintah diwajibkan untuk menyediakan seluruh informasi tersebut (Ahmad et al., 2022). Namun ternyata penggunaan website ini juga belum optimal sehingga masih banyak informasi pemerintahan yang tidak diketahui oleh masyarakat desa Tapak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sideskel Kabupaten Magetan terkait peringkat Sistem Informasi Desa Berbasis Web Kategori Umum Kec. Panekan, Ada 4 desa yang memiliki total nilai tinggi yaitu Desa Terung dengan total nilai 820, Desa Rejomulyo dengan total nilai 302, Desa Wates dengan total nilai 285, serta Desa Manjung dengan total nilai 239 yang menggunakan website desa secara aktif dan terdapat informasi data yang lengkap mengenai desa yang disajikan dalam web desa tersebut. Maka bisa dibilang desa dengan nilai total sistem informasi desa tinggi menunjukkan komitmen untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi. Kemudian di dalam data tabel diatas ada beberapa desa yang memiliki total nilai yang rendah, salah satunya adalah Desa Tapak yang hanya memiliki total nilai 15. Desa dengan nilai total yang rendah menunjukkan bahwa minimnya data maupun informasi yang disajikan di web desa, Informasi yang belum optimal dan terupdate secara berkala yaitu informasi yang wajib diumumkan. Kurangnya akses atau pemahaman terhadap sistem informasi dapat menghambat transparansi dan keterbukaan informasi yang efisien (Salman., Hasdinawati., & Arifin Z., 2023).

Pengaplikasian website di desa Tapak merupakan perwujudan dari kebijakan pemerintah desa untuk menerapkan transparansi atau keterbukaan informasi sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang sedang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa (Dawud et al., 2019). Berdasarkan hasil studi pendahuluan dan data yang didapatkan di Desa Tapak Kabupaten Magetan bisa dikatakan belum optimalnya penerapan Government guna mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik di Desa Tapak. Pada akhirnya, apakah website pemerintah Desa Tapak sudah merupakan implementasi dari E-Government yang dimaksudkan sebagai alat pemerintah untuk akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisien, serta yang menjadi penghambat dalam menerapkannya? Maka dari itu berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik mengambil judul “Penerapan E-Government Guna Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Web Di Desa Tapak Kabupaten Magetan”. Penelitian ini berorientasi pada sejauhmana informasi yang disediakan di website tersebut dapat diakses oleh masyarakat Di Desa Tapak Kabupaten Magetan, yang sedang berupaya memenuhi ketersediaan informasi seputar data di desa Tapak.

Metode

Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai penerapan e-government di Desa Tapak, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat pemerintah desa, observasi langsung terhadap penggunaan situs web, dan studi dokumen yang relevan. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dari data yang terkumpul. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk menjelaskan hasil temuan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data yang telah dianalisis untuk menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai sejauh mana penerapan e-government di Desa Tapak mampu mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan e- government, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan

infrastruktur teknologi, serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat setempat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengoptimalkan penerapan e-government di Desa Tapak agar semakin efektif dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan akses informasi bagi masyarakat ([Windiasih, 2019](#)).

Hasil dan Pembahasan

Website desa berfungsi sebagai platform resmi di mana masyarakat dapat mengakses informasi tentang pemerintahan dan kegiatan desa. Informasi yang disediakan mencakup peraturan, laporan kegiatan, program pembangunan, serta anggaran desa. Dengan menyediakan informasi tersebut, pemerintah desa berusaha untuk menciptakan keterbukaan sehingga masyarakat dapat lebih memahami proses dan keputusan yang diambil oleh pemerintah desa ([Asahan, 2022](#)). Menurut kajian dari Harvard JFK School of Government, untuk menerapkan konsep-konsep e-government pada sektor publik, terdapat tiga elemen sukses yang harus diperhatikan yaitu support, capacity dan value. Pertama support, tanpa adanya unsur political will tidak akan mungkin pembangunan dan pengembangan e-government bisa berjalan dengan mulus. Karena budaya birokrasi pemerintah cenderung berjalan berdasarkan model manajemen top down yang artinya proses pengambilan keputusan dan kebijakan dimulai dari level atas (pimpinan atau pejabat tinggi) dan kemudian disampaikan ke level yang lebih rendah untuk dijalankan. Maka dari itu sudah jelas dukungan dalam penerapan program e-government yang efektif dan efisien harus dimulai dari atas yaitu para pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi, bukan hanya pada omongannya saja melainkan tindakannya. Kedua capacity, yang dimaksud adalah adanya unsur kemampuan sumber daya manusia (SDM) dari pemerintah setempat untuk mensukseskan e-government. Ketiga Value, dalam elemen kesatu dan kedua dilihat dari aspek pemerintah selaku penyedia layanan (supply side). Penerapan E-government tidak ada gunanya jika tidak ada pihak yang diuntungkan dan yang menentukan besarnya manfaat yang didapat dengan diimplementasikan e-government ini bukanlah dari pihak pemerintah melainkan masyarakat yang mempunyai kepentingan dan sebagai pengguna layanan ([Pertwi A., Dema H., Mustanir A., & Anugrah E., 2021](#)).

Dengan begitu elemen elemen yang sudah disebutkan diatas akan membentuk suatu jaringan e-government yang merupakan kunci dari menuju kesuksesan dan keberhasilan. Maka untuk melihat Penerapan E-Government Guna Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website Di Desa Tapak Kabupaten Magetan, penulis menguraikan hasil dari beberapa wawancara yang sudah dilakukan terhadap informan berdasarkan indikator penelitian dengan sebagai berikut :

Support

Elemen support merupakan salah satu komponen terpenting dalam pengembangan E-Government. Tanpa adanya dukungan yang kuat, terutama dalam bentuk political will dari pejabat publik, inisiatif untuk menerapkan E-Government akan sulit terlaksana. Political will mencakup komitmen yang jelas dan nyata dari para pemimpin untuk mendorong perubahan menuju sistem pemerintahan yang lebih transparan dan efisien melalui teknologi ([Syahronny, 2024](#)). Dukungan ini tidak hanya terbatas pada pembuatan kebijakan, tetapi juga melibatkan berbagai aspek lain, seperti alokasi anggaran yang

memadai untuk infrastruktur digital, pengembangan sumber daya manusia, dan penyediaan pelatihan yang diperlukan untuk pegawai pemerintah. Selain itu, kolaborasi antar lembaga juga sangat penting agar implementasi E-Government dapat berjalan sinergis dan efektif. Oleh karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, untuk bekerja sama dalam mendorong dan mendukung penerapan E-Government. Dengan adanya kerjasama yang baik, kita dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, dan inovatif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sumarno, Kepala Desa Tapak, beliau menjelaskan mengenai pengimplementasian website desa yang dimulai sekitar tahun 2019. Sebelum adanya website, segala informasi terkait kegiatan dan program desa disampaikan secara manual. Metode penyampaian informasi yang digunakan cukup tradisional, seperti mengumpulkan ibu-ibu PKK untuk menyebarkan informasi di lingkungan mereka. Selain itu, peran ketua RT juga sangat penting, di mana mereka bertugas menginformasikan berbagai kegiatan kepada warga di wilayah masing-masing. Dengan begitu kerap sekali masyarakat memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan dan kecepatan penyampaian informasi. Dengan peluncuran website desa, Bapak Sumarno berharap bisa mengatasi keterbatasan tersebut. Website ini dirancang untuk menjadi sumber informasi yang lebih terintegrasi dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Namun, Bapak Sumarno juga menyadari tantangan yang dihadapi, terutama dalam hal meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi. Beliau menyatakan pentingnya edukasi dan sosialisasi agar warga dapat memanfaatkan website tersebut secara optimal. Dengan diadakan sosialisasi website ini kepada masyarakat, Pemerintah Desa Tapak mengharapkan yang mana website ini bisa mempuhkan masyarakat dalam mendapatkan layanan serta berbagai informasi desa, yang mana masyarakat bisa mengakses website dari rumah dengan mudah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa harus pergi ke balai desa dan sebagai wujud transparansi dan keterbukaan informasi publik pemerintah desa Tapak kepada masyarakat.

Dari wawancara, terlihat bahwa tanggapan masyarakat terhadap adanya sosialisasi yang disediakan oleh pemerintah desa Tapak terkait website, Banyak warga yang merasa terbantu dengan adanya panduan yang diberikan, dan mereka mengungkapkan ketertarikan untuk mulai menggunakan website desa. Namun, ada juga beberapa warga yang masih merasa ragu atau kurang percaya diri dalam menggunakan teknologi. Untuk itu, pemerintah desa berencana untuk mengadakan pelatihan lanjutan bagi warga yang membutuhkan bantuan tambahan dalam mengakses website. Untuk Elemen Support, dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Penerapan Website Desa Tapak sudah ada dan sudah diterapkan oleh pihak Pemerintah Desa Tapak itu dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Sumarno selaku Kepala Desa Tapak. Namun dalam pengoperasiannya di lingkungan masyarakat Desa tapak masih belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang lebih memilih pelayanan berbasis manual serta mendapatkan informasi desa secara langsung dengan pergi ke balai desa, hal itu sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh beberapa masyarakat diatas.

Capacity

Pada elemen kedua Elemen atau kemampuan yang dimaksud adalah adanya kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah desa untuk bisa mewujudkan keberhasilan dalam penerrapan e-government menjadi nyata (Ushuluddin & Kendari, 2018). Di antaranya adalah kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten, serta anggaran yang cukup untuk menunjang operasional dan pengembangan sistem ini.

- a. Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup dan Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai

Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup” berarti bahwa terdapat dana atau uang yang memadai untuk mendukung kegiatan atau proyek tertentu. Dalam penerapan e-government berbasis website, ketersediaan sumber daya finansial yang cukup merujuk pada adanya dana yang memadai untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara platform e-government. Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa kesadaran pentingnya digitalisasi desa, meskipun terkendala oleh anggaran yang belum dialokasikan sebelumnya. Desa Tapak menyadari bahwa website adalah alat penting untuk komunikasi dan transparansi, tetapi harus mencari cara-cara efisien untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan sumber daya yang terbatas. Hal ini menekankan perlunya perencanaan anggaran yang lebih proaktif, memanfaatkan solusi teknologi yang hemat biaya, dan menjalin kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung pengembangan website desa. Ke depannya, desa perlu memastikan adanya alokasi dana untuk teknologi digital sebagai bagian dari pengembangan layanan publik yang lebih modern dan transparan.

Terkait dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai dalam penerapan egovernment berbasis website merupakan salah satu elemen kunci dalam penerapan e-government berbasis website. Infrastruktur ini mencakup semua komponen teknis yang diperlukan untuk menjalankan platform digital yang efektif, termasuk perangkat keras, jaringan internet, server, perangkat lunak, dan sistem keamanan. Tanpa dukungan infrastruktur yang kuat, seperti koneksi internet yang stabil, server yang andal, dan sistem keamanan yang memadai, e-government tidak akan dapat berfungsi secara optimal dan dapat menyebabkan kendala dalam penyampaian layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, memastikan ketersediaan infrastruktur yang baik adalah langkah awal yang sangat penting dalam mewujudkan egovernment yang efektif dan bermanfaat. Berikut gambar kondisi dari kantor Desa Tapak:



Gambar 1. Kondisi ruang operasinal Kantor Desa Tapak

Ketersediaan infrastruktur di Kantor Desa Tapak dapat dikatakan kurang optimal, terutama dalam hal teknologi dan perangkat yang digunakan untuk menunjang operasional sehari-hari. Saat ini, terdapat empat unit komputer yang disediakan di kantor tersebut, namun hanya dua di antaranya yang masih dapat digunakan untuk bekerja. Masalah utama yang sering muncul adalah kedua komputer yang berfungsi tersebut memiliki spesifikasi yang sudah sangat tua atau jadul, sehingga performa perangkat tersebut sangat terbatas. Komputer-komputer yang ada sering kali mengalami kendala teknis, terutama terkait dengan error yang terjadi saat digunakan. Dengan kondisi ini, tentu saja ada kebutuhan mendesak untuk pembaruan atau upgrade perangkat keras komputer yang digunakan. Penggantian atau perbaikan komputer yang lebih baru dan memiliki spesifikasi lebih tinggi akan sangat mendukung kelancaran operasional di kantor desa

- b. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan.

Dalam penerapan e-government, memiliki sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berkeahlian merupakan faktor kunci agar layanan digital yang disediakan pemerintah dapat berfungsi sesuai dengan tujuan utamanya: memberikan kemudahan, efisiensi, dan manfaat maksimal bagi masyarakat. Egovernment bertujuan untuk mentransformasi layanan publik dengan memanfaatkan teknologi digital, yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan pemerintah secara lebih cepat dan mudah. Namun, keberhasilan implementasi e-government sangat bergantung pada SDM yang mengelola dan mendukung sistem ini. SDM yang kompeten di berbagai bidang seperti teknologi informasi, manajemen data, keamanan siber, pelayanan publik, dan sosialisasi sangat dibutuhkan. Dengan demikian, pemerintah perlu memastikan bahwa mereka memiliki tenaga kerja yang terampil dan terus melatih serta mengembangkan kemampuan SDM agar mampu mengelola platform egovernment dengan baik. Tanpa SDM yang berkompeten, upaya digitalisasi ini mungkin tidak dapat memberikan manfaat yang optimal dan bahkan bisa menimbulkan tantangan dalam penggunaannya.

Pada awal peluncuran website pemerintah Desa Tapak pada tahun 2019, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam teknologi digital masih sangat terbatas. Saat itu, kebanyakan perangkat desa sudah berusia lanjut, sehingga keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi modern, seperti mengelola website, mungkin tidak cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan e-government secara optimal. Berikut daftar kualitas SDM di Pemerintah Desa Tapak berdasarkan usia dan tingkat pendidikan yang terakhir ditempuh:

Tabel 1. Sumber Daya Manusia di Pemerintah Desa Tapak

Nama	Pendidikan	Umur	Tahun Menjabat
Sumarno	SLTA	56 Tahun	2008
Dhoris	S1	34 Tahun	2015
Sunarsih	SLTA	48 Tahun	2014
Sugiharto	SLTA	50 Tahun	2014
Sunar	SLTA	50 Tahun	2011
Warsiti	SMA	53 Tahun	2002
Sunaryo	SLTA	43 Tahun	2014
Khozinatul	S1	25 Tahun	2023
Maryoto	SLTA	58 Tahun	2002
Edy	SLTA	59 Tahun	2002
Suwaris	SLTA	60 Tahun	2002
Suratno			

Sumber: RPJMDESA Tapak 2020-2025

Berdasarkan data tabel diatas diketahui bahwa, dari data pendidikan perangkat Desa Tapak, terlihat bahwa mayoritas perangkat desa hingga awal tahun 2023 awal memiliki latar belakang pendidikan terakhir setara Sekolah Menengah Atas (SMA). Hanya satu perangkat yang menempuh pendidikan hingga jenjang S1, yaitu sekretaris desa. Hal ini mencerminkan bahwa, secara umum, pendidikan perangkat desa masih tergolong terbatas pada tingkat menengah, yang mungkin berimplikasi pada kualitas kinerja itu sendiri. Di sisi usia, sebagian besar perangkat desa hingga awal 2023 berusia 40 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan dominasi perangkat yang sudah cukup berpengalaman, namun juga memiliki dampak kurang baik, antara lain Perangkat yang lebih senior sering kali mengalami kendala adaptasi terhadap teknologi digital terbaru. Hal ini dapat berpengaruh pada kinerja mereka terutama dalam hal administrasi yang membutuhkan penggunaan perangkat lunak atau aplikasi tertentu termasuk penerapan e-government berbasis website ini. Akan tetapi Pada akhir tahun 2023, desa merekrut perangkat baru yang lebih muda dan memiliki pendidikan hingga jenjang S1 dan masih berusia muda. Kehadiran perangkat muda ini memberikan potensi baru dalam membantu dalam peneran e-government berbasis website. Secara keseluruhan, komposisi perangkat Desa Tapak menunjukkan perkembangan yang positif dengan adanya penambahan perangkat muda yang memiliki jenjang pendidikan tinggi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan keberhasilan e-government di Desa Tapak, pemerintah desa perlu meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknologi dan pengelolaan website.

Value

Elemen pertama dan kedua dalam penerapan e-government merupakan aspek yang dilihat dari sisi pemerintah sebagai pihak pemberi jasa (*supply side*). Pemerintah berperan dalam menyediakan infrastruktur, sumber daya manusia, dan layanan berbasis teknologi digital yang berfungsi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai informasi dan layanan publik. Namun, pelaksanaan e-government tidak akan efektif jika tidak memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan, atau demand side (Alfiris S., & Sujana N., 2024). Dalam konteks ini, yang menentukan seberapa besar manfaat dari e-government bukan hanya pemerintah sebagai penyedia layanan, tetapi juga sejauh mana layanan ini memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan kemudahan akses, transparansi, dan efisiensi dari e-government akan merasakan manfaat yang optimal, yang pada akhirnya juga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan terhadap layanan pemerintah. Melalui website Desa Tapak ini, pengajuan surat yang sebelumnya memerlukan waktu lebih lama dan proses manual, kini bisa dilakukan secara online, sehingga lebih efisien dan mengurangi beban administratif di kantor desa. Hal ini juga memungkinkan Pemerintah Desa Tapak untuk lebih terorganisir dalam menangani permohonan surat, mengurangi kesalahan administratif, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan penggunaan teknologi seperti ini, desa dapat memberikan pelayanan publik yang lebih modern dan responsif, sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi warganya untuk mendapatkan layanan yang mereka butuhkan.

Dapat disimpulkan Dalam elemen value sesuai dengan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Manfaat yang dirasakan oleh Pemerintah Desa Tapak, penerapan e-government berbasis website dapat memudahkan masyarakat, membuat pelayanan lebih efektif dan efisien. Dapat mengurangi padatnya antrian di kantor saat ada masyarakat mengurus berkas lainnya. Tapi berdasarkan penjelasan diatas mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang memilih pelayanan secara manual dari pada pelayanan online karena terdapat beberapa kendala.
- b. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima layanan dalam penerapan pelayanan dan penyediaan informasi secara online dari yang disampaikan oleh masyarakat sebenarnya dan penyediaan informasi secara online melalui website itu sangat membantu masyarakat karena selain dapat menghemat waktu tanpa perlu datang langsung ke kantor Desa Tapak juga dapat menghemat biaya juga transportasi. Tapi karena masyarakat banyak yang belum paham cara mengurus atau menggunakan pelayanan yang berbasis online membuat masyarakat lebih memilih menggunakan pelayanan untuk mendapatkan informasi maupun data desa yang dibutuhkan secara manual atau langsung ke kantor Desa Tapak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul Penerapan E-Government Guna Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa

Tapak Kabupaten Magetan yang menggunakan tiga indikator dari Indrajit yaitu support, capacity dan value disimpulkan sebagai berikut: Pertama dalam indikator support bahwasannya Pemerintah Desa Tapak sudah mensosialisasikan pada awal peluncuran website resmi Desa Tapak kepada masyarakat, namun masyarakat menilai bahwa belum maksimal dalam penerapannya dikarenakan masih terdapat masyarakat banyak yang masih belum paham dan kesulitan dalam mengakses website tersebut. Kemudian kedua yaitu indikator Capacity, bahwasannya Pemerintah Desa Tapak dalam menjalankan serta menerapkan e-government berbasis website ini pemerintah desa terkait anggaran belum mengalokasikan untuk pembuatan website tersebut dan juga untuk infrastruktur ini bisa dikatakan belum memadai dilihat dari komputer yang bisa dipakai hanya dua serta masih model lama yang sering terjadi error waktu dioperasikan.

Selanjutnya mengenai SDM juga masih belum didukung dilihat dari riwayat pendidikan dan usia rata rata perangkat yang sudah sepuh, Hal ini dapat menjadi kendala dalam penerapan teknologi dan pembaruan digital di desa, terutama dalam mengelola website resmi dan memastikan kelancaran informasi secara online. Namun, kini terdapat harapan baru dengan adanya perangkat baru yang telah direkrut, yang diharapkan bisa membawa pembaruan dalam tata kelola digital desa. Yang ketiga indikator value, penerapan e-government berbasis website yang dilakukan Pemerintah Desa Tapak dengan meluncurkan website sebagai penyedia layanan informasi serta data desa ini dinilai memudahkan masyarakat serta menghemat biaya juga transportasi dan waktu tanpa perlu mengantri, khususnya warga yang sibuk diluar desa, karena hanya dengan mengakses website secara online dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa harus pergi ke kantor desa Tapak secara langsung, walaupun ada beberapa informasi dan data yang belum tersedia serta kendala jaringan yang menjadi penghambat.

Referensi

- Adillah, N., Murodi, A., Muhtadi, Y., Islam, U., & Yusuf, S. (2024). Implementasi e-Government pada Layanan Informasi Publik Berbasis Website Smart Desa Digital di Desa Tegal Angus Kecamatan Teluknaga. *Jurnal Mimbar Administrasi*, 21(2), <https://doi.org/10.56444/mia.v22i2.2070>
- Ahmad, Z. H., Akhmad, M., Alfayn, N., & Istiqoh, A. E. (2022). Analisis Upaya Strategis dalam Memaksimalkan Penerapan Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Desa. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1432–1437. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2143>
- Andra B. A. Firhansyah, Supriyatna A., & Jannah B. R., (2023). Mewujudkan Transparansi Melalui Keterbukaan Informasi Publik: Studi Kasus Festival Anggaran Kabupaten Batang. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(3). <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i3.303>
- Pertiwi A., Demas H., Mustanir A., & Anugrah E., (2021). Penerapan E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng). *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 9, 130–139. <https://doi.org/10.55678/prj.v9i3.508>
- Asahan, K. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk E-Government Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan. *Jurnal*

- Pengabdian Al-Ihklas ,8(2) 286–294.
<http://dx.doi.org/10.31602/jpaiuniska.v8i2.6848>
- Dawud, J., Mursalim², S. W., & Anomsari³, Endah Tri, Taufik⁴, N. I. (2019). Strategi Perwujudan Kota Bandung Sebagai Kota Ramah Penyandang Disabilitas: Sebuah Perspektif Aksesibilitas Pelayanan Publik Disability-Friendly City: A Perspective Of Public Service Accessibility. *Jurnal Administrasi Negara*, 25(2).
https://journal.stialanmakassar.ac.id/index.php/jurnal_administrasi_negara/article/download/543/63
- Laksana, T., Di, E. D., & Tanimulya, D. (2014). Tata laksana e-government desa di desa tanimulya kabupaten bandung barat. *Jurnal Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 1(1), <https://doi.org/10.36859/jp.v1i1.2571>
- Prisanda, E., & Febrina, R. (2019). Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikai Berbasis Aplikasi SISPEDAL Dalam Rangka Mewujudkan Good Village Governance. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 154–170.
<https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i2.723>
- Alfiris S., & Sujana N., (2024). Implementasi E-Government Pada Layanan Informasi Publik Melalui Aplikasi Tangerang Gemilang di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(4), 817–824. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10533303>
- Salman., Hasdinawati., & Arifin Z. (2023). Manajemen Situs Web Desa Untuk Mendukung Penyampaian Informasi Berbasis di Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 14, 80–88.
<https://doi.org/10.47030/administrasita.v14i2.694>
- Setyawan, A. (2022). Penggunaan Sistem Informasi Desa Dalam Pelayanan Publik Di Pemerintah Desa Wonokerto Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(02), 43–52.
<https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/538/385>
- Syahronny, M. (2024). Analisis Penerapan E-Government Pada Aplikasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (Sipraja) di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(06), 55–62.
<https://doi.org/10.69957/praob.v4i06.1675>
- Ushuluddin, F., & Kendari, I. (2018). Peran E-Government Dalam Mewujudkan Transparansipemerintahan Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *AL-IZZAH: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 135–153. <https://dx.doi.org/10.31332/ai.v12i1.535>
- Windiasih, R. (2019). Komunikasi Pembangunan di Era Digital Melalui E-Government Dalam Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan. *Suluh Pembangunan: Journal of Extension and Development*, 1, 14–21.
<https://jsp.fp.unila.ac.id/index.php/jsp/article/view/6/4>
- Yuono, C. (2023). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 6(2), 418–431.
<https://doi.org/10.32509/pustakom.v6i2.3287>